

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Target dari pembangunan nasional adalah mengurangi tingkat kemiskinan (Putri dan Yuliarmi, 2013). Kemiskinan juga telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012). Masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan (Vincent, 2009). Maka dari itu, upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh (Nasir, 2008). Sebuah rumah tangga dikatakan miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan jika rumah tangga tidak miskin itu jika pendapatannya berada di atas garis kemiskinan (Krishna *et al.* 2007).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut seras dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (Safuridar, dan putri 2019).

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi

lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi (Safuridar dan Putri 2019).

DIY merupakan salah satu destinasi wisata baik lokal maupun internasional, kemudian dikenal sebagai salah satu kota pendidikan terbaik di Indonesia. Tapi, masih banyak terdapat masalah ekonomi dan sosial yang dialami masyarakat Yogyakarta. Penduduk Yogyakarta masih banyak yang belum mampu mengakses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam artian masih banyak dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin (Persen) Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2018

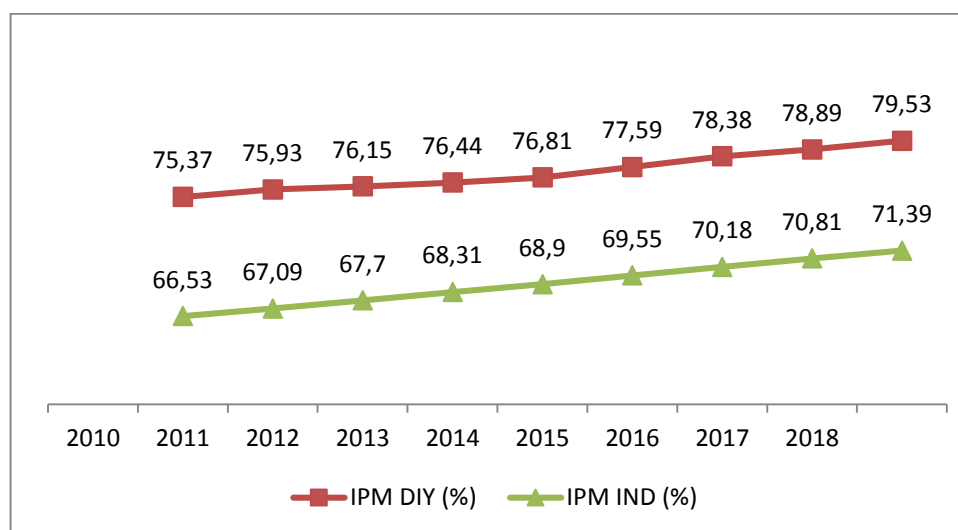
Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
DKI Jakarta	3.63	4.05	3.77	3.75	3.77	3.56	3.74
Jawa barat	9.56	9.31	9.55	8.86	8.27	7.35	8.81
Jawa tengah	14.5	14.02	13.45	13.23	12.62	11.25	13.17
D.I.Yogyakarta	15.23	14.77	14.03	13.22	12.69	11.97	13.65
Jawa timur	12.64	12.35	12.31	11.95	11.48	10.91	11.94
banten	5.81	5.43	5.82	5.39	5.52	5.24	5.53
Nasional	11.42	11.10	11.17	10.78	10.38	9.74	10.76

Sumber: BPS RI diolah.

Presentase jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren menurun jika dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2018. Dengan penurunan presentase penduduk miskin ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Meskipun jumlah kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan, namun presentase kemiskinan Provinsi DIY masih lebih tinggi dibandingkan presentase kemiskinan nasional,

untuk itu diperlukan usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan guna menekan angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu sumber yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah (Alhudori, 2017).



Grafik 1.1 Perbandingan IPM DIY dan Indonesia Tahun 2010-2018
Sumber: BPS RI 2018

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DIY dan IPM nasional menunjukkan gap yang cukup jauh. Dari Grafik 1.1 data Indeks Pembangunan Manusia DIY jauh lebih tinggi di bandingkan Nasional, akan tetapi tingkat kemiskinan di DIY masih tinggi (>10 persen).

Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan ialah usaha sadar dan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Todaro (2013) mengemukakan bahwa struktur pendidikan yang berlaku pada suatu daerah dapat mempengaruhi karakter sosial dan ekonomi masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Sanz, et al (2017) berpendapat bahwa kemiskinan sangat mungkin dipengaruhi oleh pendidikan. Adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Tabel 1.2 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 - 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kulonprogo	8.20	8.40	8.50	8.64	8.65
Bantul	8.74	9.08	9.09	9.20	9.35
Gunung Kidul	6.45	6.46	6.62	6.99	7
Sleman	10.28	10.30	10.64	10.65	10.66
Yogyakarta	11.39	11.41	11.42	11.43	11.44
D.I.Yogyakarta	8.84	9	9.12	9.19	9.32

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat kita lihat bahwa rata – rata lama sekolah di lima kabupaten kota yang berada di Provinsi D.I.Yogyakarta pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi jika dilihat dari perbandingan kabupaten/kotanya masing-masing, kabupaten/kota yang memiliki lama sekolah paling rendah yaitu terjadi di kabupaten Gunung Kidul sedangkan yang memiliki lama sekolah paling tinggi terjadi di Kota Yogyakarta (BPS 2019).

Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), yang dimaksud dengan sehat yaitu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dituliskan bahwa

setiap orang berhak atas kesehatan. Dalam hal ini, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan derajat kesehatan pada khususnya.

Menurut Mariyanti dan Mahfudz (2016), dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk dapat memberikan dampak pada tingkat kemiskinan sehingga negara yang penduduknya sehat juga diyakini akan memiliki perekonomian yang “sehat”. Menurut Wyk dan Bradshaw (2017) masyarakat yang memiliki Angka Harapan Hidup yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Ataguba, et al (2013) kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan.

Tabel 1.3 Angkaha Harapan Hidup Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 - 2018

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	Angkaha Harapan Hidup (Tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kulonprogo	74.50	74.68	74.71	74.74	74.82
Bantul	73.24	73.44	73.50	73.56	73.66
Gunung Kidul	73.39	73.69	73.76	73.82	73.92
Sleman	74.47	74.57	74.60	74.63	74.69
Yogyakarta	74.05	74.25	74.30	74.35	74.45
D.I.Yogyakarta	74.50	74.68	74.71	74.74	74.82

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, dapat kita lihat bahwa Angka harapan hidup di lima kabupaten kota yang berada di Provinsi D.I.Yogyakarta pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi jika dilihat dari perbandingan kabupaten/kotanya masing-masing, kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup paling rendah yaitu terjadi di kabupaten Bantul sedangkan yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi terjadi di kabupaten kulonprogo (BPS 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di Provinsi D.I.Yogyakarta dalam periode 2011-2018 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata rata tingkat kemiskinan di Provinsi DIY dibandingkan provinsi-provinsi di pulau jawa masih tinggi. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi DIY menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi DIY sehingga dapat digunakan sebagai kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi DIY. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY?
2. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap kemiskinan di Provinsi DIY?
3. Bagaimana Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama di Provinsi DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi ekonomi pembangunan, fakultas bisnis dan ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bagi pemerintah DIY, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Untuk megembangkan wawasan dalam bidang keilmuan terutama bagi pihak lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga bahwa Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Diduga bahwa secara bersamaan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari penelitian yang mencakup landasan teori, bagaimana pengaruh antara variabel dependen dengan independen, dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau studi terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, dan uji-uji yang akan digunakan dalam penelitian serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai hasil perhitungan dari analisis data dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran terhadap penelitian.